

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA  
PADA PERUSAHAAN YANG SAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Febriadi Ardiwinata**

**0987005**

**ABSTRAK**

Pada kehidupan manusia yang semakin dinamis, tidak dapat dipungkiri lagi menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Salah satu masalah yang dihadapi adalah larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama. Di satu sisi, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna dari pernyataan tersebut, tidak boleh ada diskriminasi oleh perusahaan dalam hal ini antara pria dan perempuan dalam menentukan pekerjaan yang dia inginkan. Pemerintah juga harus menjamin bahwa diskriminasi tersebut harus dihapuskan dalam kebijakan-kebijakan setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Namun dalam praktiknya masih ada perlakuan diskriminasi terhadap suami-istri yang dilarang bekerja pada perusahaan yang sama.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Dengan metode deskriptif analitis ini akan dikaji mengenai konsistensi Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terkait larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama.

Adanya perlakuan diskriminasi perusahaan terhadap pegawai yang menikah dengan sesama pegawai dalam perusahaan yang sama bertentangan dengan isi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tiap individu manusia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 153 ayat(1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak konsisten terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijunjung tinggi setiap manusia tanpa terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu disarankan bagi perusahaan wajib untuk menghapuskan setiap keputusan ataupun kebijakan yang melarang suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama serta bagi pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan mengkaji ulang isi Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena diidentifikasi dapat dilakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap isi Pasal 153 ayat (1) huruf f tersebut.

**Kata Kunci : Suami-Istri, Perusahaan, Ketenagakerjaan**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF MARRIED COUPLES  
BEING PROHIBITED FROM WORKING FOR THE SAME COMPANY AS  
RELATED TO LABOR LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING  
EMPLOYMENT AFFAIRS***

**Febriadi Ardiwinata**

**SRN : 0987005**

**ABSTRACT**

It can no longer be denied that in people's increasingly dynamic lives, various problems are bound to arise that are job-related. One of these problems consists of the phenomenon of married couples being prohibited from working for the same company. On the one hand, as stated in Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution, each state is entitled to jobs and livelihoods suitable for humanity, i.e. its citizens. This effectively means that there may be no discrimination on the basis of gender bias in any company when it comes to determining the particular type of employment that the male or female applicant might seek. The government must also guarantee that this kind of discrimination will be eliminated from the various policies of each and every company based in Indonesia. However, in practice there still remains some form of discrimination discernible in the way married couples are treated when they are not allowed to be employed by the same company.

The method employed for this thesis consists of juridical-normative research, namely library research comprising the type of research classified as secondary data collection. The latter includes primary, secondary and tertiary legal sources and materials. The primary set includes related legislative regulations, whereas the secondary materials cover library sources containing information on various textbooks written by legal experts, law journals, related articles and Internet-based sources, among others that are found to correlate with ways of supporting the research method. Tertiary legal materials comprise supporting facts to provide guidelines for the primary and secondary materials mentioned. By way of the juridical-normative method, the consistency of Article 153, paragraph (1 f) of Labor Law Number 13 Of 2003 concerning Employment Affairs and the Application of Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution related to the prohibition of married couples from working at the same company will be closely investigated.

The existence of discriminatory treatment of employees by their company conflicts with the contents of Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution, which guarantees that every human individual is entitled to obtain a suitable job and livelihood. The prohibition of married couples from being employed by the same company mentioned above in fact denies this Human Right, referred to as HAM in Indonesia. Article 153, paragraph (1f) of Labor Law Number 13 concerning Employment Affairs is not consistent with Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Without exception, the latter ought to be held in high esteem by each human being in our social life. Keeping this in mind, companies are strongly advised to make it their obligation to eliminate all decisions and policies that still prohibit married

couples from working for the same company; in addition, the government (in this case, the Indonesian Legislative Assembly or DPR) is expected to re-examine the actual contents of Article 153, paragraph (1f) of Labor Law Number 13 of 2003 concerning Employment Affairs due to its having been identified as a potential violation of the principles to be found in Article 153, paragraph 1f mentioned earlier.

**Key words: Married Couples, Companies, Employment Affairs**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pernyataan Keaslian.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Halaman Persetujuan Penguji.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II PENGATURAN KETENAGAKERJAAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	<b>22</b>
A. Hak Asasi Manusia (HAM).....	22
1. Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM).....	22
2. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Indonesia.....	26
B. Pengaturan Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	32
C. Perselisihan Hubungan Industrial.....	37
1. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Luar Pengadilan.....	39
2. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.....	42
D. Prinsip Non Diskriminasi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	44

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERKAIT KLAUSA ISTRI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA</b>	57
	A. Kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menurut Hukum Ketenagakerjaan.....	57
	1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ....	57
	2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	62
	3. Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	64
	4. Kedudukan Perusahaan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	69
	B. Hubungan Kontraktual Antara Badan Usaha Milik Negara Dengan Pekerja .....	70
	1. Perjanjian Kerja Bersama(PKB).....	76
	2. Peraturan Perusahaan.....	78
	3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	79
	4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	85
	C. Substansi Peraturan Perusahaan di Badan Usaha Milik Negara khususnya di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terkait Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama.....	92
	1. Sejarah Perusahaan Listrik Negara (PLN).....	92
	2. Peraturan Perusahaan PLN.....	95
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS LARANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA PADA PERUSAHAN YANG SAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</b>	100
	A. Analisis Yuridis Pengaturan Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.....	100
	B. Analisis Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 D juncto Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 terkait Larangan Suami-Istri Bekerja pada Perusahaan yang Sama dari ketentuan yang memberi peluang adanya pemutusan hubungan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	104
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	109
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Saran.....	110
	Daftar Pustaka.....	xiii
	Curriculum Vitae.....	xvi

